

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. *Financial distress*

*Financial Distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan timbul biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) yang disebabkan oleh: keterpaksaan menjual aktiva dibawah harga pasar, biaya likuidasi perusahaan, rusaknya aktiva tetap dimakan waktu sebelum terjual, dan sebagainya. *Bankruptcy costs* ini termasuk “*Direct cost of financial Distress*”.

Selain itu, ancaman akan terjadinya *financial distress* juga merupakan biaya karena manajemen cenderung menghabiskan waktu untuk menghindari kebangkrutan daripada membuat keputusan perusahaan yang baik. Ini termasuk “*Indirect costs of financial distress*”.

Pada umumnya, kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin meningkat dengan meningkatnya penggunaan utang. Logikanya adalah semakin besar penggunaan hutang, semakin besar pula beban biaya bunga, semakin besar probabilitas bahwa penurunan penghasilan akan menyebabkan *financial distress* [13].

Prediksi mengenai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor maupun manajemen. Bagi kreditur analisis ini menjadi bahan pertimbangan utama dalam memutuskan untuk menarik piutangnya, menambah piutang untuk mengatasi kesulitan tersebut, atau mengambil kebijakan lain. Sementara dari sisi investor hasil analisisnya akan digunakan untuk menentukan sikap terhadap sekuritas yang dimiliki pada perusahaan di mana ia berinvestasi.

Indikator *financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Interest coverage ratio* yang dirumuskan sebagai berikut [3]:

$$\text{Interest coverage ratio (ICR)} = \frac{\text{Earning before interest tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}} \quad (2.1)$$

Dimana variabel dependen menggunakan variabel *dummy* dengan ukuran binomial, yaitu nilai (1) yang berarti perusahaan mengalami *financial distress* apabila perusahaan memiliki *Interest coverage ratio* kurang dari 1, dan nilai (0) perusahaan tidak mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut memiliki *Interest coverage ratio* lebih dari 1 [3].

### 2.1.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase (%) kepemilikan saham perusahaan oleh manajer [14]. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan [15]

Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif bahkan tidak ditunjuk lagi sebagai manajer dan sebagai pemegang saham akan kehilangan *return* bahkan dana yang diinvestasikannya.

Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian maka kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang secara optimal sehingga akan meminimumkan biaya keagenan. Untuk mensejajarkan antara kepentingan manajer dengan pemilik perusahaan, terdapat mekanisme khusus yang dapat digunakan untuk memotivasi manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Salah satunya adalah meningkatkan kepemilikan saham terhadap manajer. Langkah ini ditunjukkan untuk menarik dan mempertahankan manajer yang baik dan juga untuk mengarahkan

tindakan manajer agar mendekati kepentingan pemegang saham, terutama untuk memaksimalkan harga saham.

Rumus yang untuk menghitung Kepemilikan manajerial adalah [14]:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.2)$$

### 2.1.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham luar (non manajemen) atas saham perusahaan seperti bank, asuransi, atau institusi lain. Kepemilikan institusional yaitu proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dengan persentase (%) [16].

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Semakin besar kepemilikan institusional maka pemanfaatan aktiva perusahaan semakin efisien sehingga mencegah pemborosan yang dilakukan manajemen.

Keberadaan kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga akan mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* [17].

Kontrol yang efektif dari investor institusional telah mengambil alih peranan hutang sebagai alat kontrol manajemen, sehingga menyebabkan penggunaan hutang menurun.

Rumus yang untuk menghitung Kepemilikan institusional adalah [17]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4. Likuiditas

Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu [16]. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek [18]. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar [7]. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya [19].

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang penting adalah rasio lancar. Ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar [20].

Rasio likuiditas bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya [21]. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan jangka pendek yang kuat apabila:

1. Mampu memenuhi tagihan dari kreditur jangka pendek tepat pada waktunya,
2. Mampu memelihara modal kerja yang cukup untuk membelanjai operasi perusahaan yang normal,
3. Mampu membayar bunga utang jangka panjang pendek dan dividen, dan
4. Mampu memelihara kredit rating yang menguntungkan [21].

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memiliki kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Dengan kata lain rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang likuid, sebaliknya jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid. Untuk dapat memenuhi jangka pendeknya yang akan segera jatuh



tempo, perusahaan harus memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas yang baik atau aset lancar lainnya yang juga dapat dengan segera dikonversi atau diubah menjadi kas [22].

Seharusnya semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya. Akan tetapi, rasio ini harus dianggap sebagai ukuran kasar karena tidak memperhitungkan likuiditas (*liquidity*) dari setiap komponen aset lancar. Perusahaan yang memiliki aset lancar sebagian besar terdiri atas kas dan piutang yang belum jatuh tempo, umumnya akan dianggap sebagai lebih likuid daripada perusahaan dengan aset lancar sebagian besar terdiri atas persediaan [23].

Tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas adalah [24].

1. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Indikator likuiditas dalam penelitian ini menggunakan Rasio lancar (*current ratio*) untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan yang telah diukur dalam persentase (%). Dengan kata lain,

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total hutang lancar.

Rasio lancar (*Current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo [16].

*Current ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar rasio ini berarti semakin likuid perusahaan. Namun demikian rasio ini mempunyai kelemahan, karena tidak semua komponen aktiva lancar memiliki tingkat likuiditas yang sama. Indikator likuiditas pada penelitian ini adalah *Current ratio*. *Current ratio* 200% yang bisa diartikan perbandingan aktiva lancar dibandingkan hutang lancar adalah 2:1, artinya Rp 2,- aktiva lancar untuk menjamin Rp 1,- hutang lancar. Kondisi ini tidak serta merta dapat dijadikan dasar menyimpulkan bahwa likuiditas perusahaan sudah dalam keadaan likuid jika salah satu komponen elemen modal kerja menumpuk atau tidak seimbang. Misalnya, menumpuk di piutang, persediaan ataupun menumpuk di kas, yang dapat mengganggu jalannya aktivitas modal kerja [25].

Rumus untuk menghitung *Current ratio* adalah [18]:

$$\text{Current ratio (CR)} = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}} \quad (2.4)$$

### 2.1.5. Leverage

*Leverage* adalah harta perusahaan didongkrak dengan hutang atau *leverage* adalah kemampuan perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai investasi [26]. *Leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham [13]. *Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban

tetap bagi perusahaan [18]. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah penggunaan hutang untuk meningkatkan total harta. Semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan [27]. Rasio *leverage* dapat menilai sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang [28]. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* menunjukkan seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi perusahaan akibat menggunakan dana pinjaman untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio *leverage* adalah [22]:

1. Kemudahan dalam mendapatkan dana.
2. Jumlah dana yang dibutuhkan.
3. Jangka waktu pengembalian dana.
4. Kemampuan perusahaan dalam membayar beban pinjaman.
5. Pertimbangan pajak.
6. Masalah kendali perusahaan.
7. Pengaruhnya terhadap laba per lembar saham.

Manfaat dan tujuan rasio *leverage* adalah [24]:

1. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Indikator rasio *leverage* pada penelitian ini adalah *debt to asset ratio*. *Debt*

*to asset ratio* ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya [18]. *Debt to asset ratio* yang membandingkan antara total hutang dan total aktiva yang telah diukur dalam persentase (%). Para kreditur menginginkan *debt to asset ratio* yang rendah karena semakin tinggi ratio ini maka semakin besar risiko para kreditur [29].

Rumus untuk menghitung *debt to asset ratio* adalah [18]:

$$\text{Debt to asset ratio (DAR)} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total asset}} \quad (2.5)$$

#### 2.1.6. Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengukuran rasio tersebut dapat diambil kesimpulan apakah perusahaan telah secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya [22].

Rasio aktivitas menggambarkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki dalam memperoleh penghasilan melalui penjualan dan rasio aktivitas tidak semata-mata mengukur tinggi rendahnya rasio yang dihitung untuk mengetahui baik atau tidaknya keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan rasio aktivitas untuk mengukur kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditentukan dan hasil perhitungan rasio aktivitas bukan dalam persentase melainkan berapa kali atau beberapa hari [13].

Indikator aktivitas dalam penelitian ini menggunakan *Fixed Asset Turnover Ratio*. *Fixed Asset Turnover Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain untuk mengukur seberapa efektif kapasitas aset turut berkontribusi menciptakan penjualan. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan (tunai maupun kredit) dengan rata-rata aset tetap. Yang dimaksud dengan



rata-rata aset adalah aset tetap awal tahun ditambah aset tetap akhir tahun lalu dibagi dengan dua. Perputaran aset tetap yang rendah berarti perusahaan memiliki kelebihan kapasitas aset tetap, dimana aset tetap yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan yang telah diukur dalam persentase (%) [22].

Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Kalau perputarannya lambat (rendah), kemungkinan terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aktiva tetap namun kurang bermanfaat, atau mungkin disebabkan hal-hal lain seperti investasi pada aktiva tetap yang berlebihan dibandingkan dengan nilai output yang akan diperoleh. Jadi semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut [30].

Rumus yang untuk menghitung *Fixed Asset Turnover Ratio* adalah [22] :

$$\text{Fixed Asset Turnover Ratio} = \frac{\text{Penjualan}}{(\text{aset Tetap awal tahun} + \text{aset tetap akhir tahun}) : 2} \quad (2.6)$$

### 2.1.7. Ukuran Perusahaan

Untuk melihat ukuran perusahaan dapat dilihat pada pengelompokan perusahaan yaitu *growth industry*, *defensive industry* dan *cyclical industry*. *Growth industry* menunjukkan perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba jauh lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata perusahaan. Yang termasuk *growth industry* adalah perusahaan telekomunikasi. *Defensive industry* menunjukkan perusahaan yang tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Contohnya seperti perusahaan makanan dan minuman. *Cyclical industry* menunjukkan perusahaan yang sangat peka terhadap kondisi perekonomian. Contohnya seperti perusahaan otomotif, dan barang konsumsi elektronika tahan lama. Pengklasifikasian ukuran perusahaan ini bermanfaat untuk memperkirakan seberapa besar pengaruh perubahan kondisi perekonomian terhadap kondisi suatu perusahaan [31].

Ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan [28]. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total aset [32].

Ukuran perusahaan mencerminkan perusahaan tersebut agar dapat berkompetisi dengan pesaingnya karena memiliki aktiva lebih besar. Aktiva merupakan tolak ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya perusahaan besar mempunyai aktiva yang besar pula nilainya. Secara teoritis perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian (*certainty*) yang lebih besar dari perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan kedepan. Itu artinya perusahaan kecil memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi dibanding perusahaan besar [33].

Indikator ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan total aktiva. ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Aktiva mempunyai sifat pokok yaitu mempunyai sifat pokok yaitu mempunyai kemungkinan manfaat di masa yang akan datang. Total aktiva adalah jumlah aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Dengan menggunakan total aktiva dimaksudkan untuk memperoleh ukuran perusahaan. Atau dengan kata lain untuk memperoleh ukuran perusahaan dengan menggunakan total aktiva [31]. Pengukuran dengan menggunakan total aktiva dianggap lebih baik daripada pengukuran dengan total penjualan. Hal tersebut dikarenakan total aktiva perusahaan lebih stabil daripada total penjualan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar.

Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Secara umum, ukuran perusahaan diprosikan dengan total aktiva karena nilai total aktiva biasanya lebih besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya dan variabel aktiva diukur dengan *logaritma natural* dari total aktiva [34].

Rumus yang untuk menghitung Ukuran Perusahaan adalah [34] :

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln} (\text{total aktiva perusahaan}) \quad (2.7)$$

### 2.1.8. Opini *Going Concern*

Auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia [35]. Pemberian opini audit dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan stakeholders perusahaan karena memungkinkan pihak di luar perusahaan untuk memverifikasi validitas laporan keuangan.

Terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu sebagai berikut [36]:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain,
- b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI,
- c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material,
- d. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya,
- e. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

### 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Sesuai dengan SA 508 paragraf 38 dikatakan bahwa jenis pendapat ini diberikan apabila:

- a. tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan,
- b. auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

### 4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat tidak wajar diberikan terhadap laporan keuangan.

### 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*) Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini diberikan apabila:

- a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu,
- b. Auditor tidak independen terhadap klien.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat hanya sebatas pada hal-hal yang ditampilkan dalam laporan keuangan saja tetapi juga harus lebih mewaspadaikan hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Inilah yang menjadi alasan mengapa auditor turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu usaha meskipun dalam batas waktu tertentu.

Opini *going concern* dapat diterbitkan pada laporan audit dengan tambahan paragraph penjelas di bawah paragraph pendapat yang menjelaskan dampak kondisi terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup



usaha di masa mendatang. Opini audit dengan modifikasi mengenai *going concern*, mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis yang normal. Di lain pihak, perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang baik atau sehat memperoleh opini “*standard*” atau “*unqualified*”.

Indikator opini *going concern* dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana (1) untuk opini *going concern* yaitu audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan/ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya, dan (0) untuk opini non *going concern*, yang terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjasar, opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak memberikan opini [9].

Opini *going concern*=opini *going concern* (1),opini non *going concern*(0) (2.8)

### 2.1.9. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi [37]. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indicator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan, baik komisaris independen maupun komisaris non-independen [38].

Bukti empiris yang ditemukan menunjukkan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris dengan kondisi *financial distress* pada perusahaan. Jumlah komisaris akan memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kondisi keuangan perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan dengan lebih baik sehingga kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin menurun [39]. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two tier*, yaitu dewan terdiri dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan fungsi monitoring terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan sehari-hari. Keuntungan dan kerugian pada sisi yang berlawanan pada ukuran dewan komisaris

dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Pada satu sisi, ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan kemampuan dewan tersebut dalam mengawasi kinerja operasional perusahaan. Namun di sisi lain, ukuran dewan komisaris yang besar akan menimbulkan permasalahan komunikasi dan koordinasi sehingga pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* [39]. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) sampai 3 (tiga) anggota Dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Indikator ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris sebagai berikut :

$$\text{Ukuran dewan komisaris} = \text{jumlah anggota komisaris} \quad (2.8)$$

## 2.2 Review Peneliti Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penelitian :

1. Penelitian Claudia Laurenzia dan Sufiyati (2015) dengan judul "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Likuiditas, Aktivitas, Dan *Leverage* Terhadap *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2014". Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara terus-menerus menerbitkan laporan keuangan pada periode 2013-2014. Berdasarkan metode *purposive sampling*, terdapat 62 perusahaan sampel pada periode 2013-2014 sehingga terdapat 124 perusahaan yang diobservasi. kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan ukuran dewan komisaris, likuiditas, aktivitas, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress* [3].

2. Penelitian Indra Hastuti (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kesulitan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008–2012)”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 – 2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data observasi periode tahun 2008 - tahun 2012 sebanyak 156 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Rasio likuiditas dan rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008 – tahun 2012 Sedangkan kepemilikan institusional, rasio *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008 – tahun 2012 [1].
3. Penelitian Yeni Yustika (2015) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, *Operating Capacity* Dan Biaya Agensi Manajerial Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013 sebanyak 128 perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Setelah melakukan seleksi pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 18 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Hasil penelitian menunjukkan likuiditas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan *operating capacity* dan biaya agensi manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* [6].
4. Penelitian Puji Astuti (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Opini *Going Concern*, Likuiditas, Solvabilitas, Arus Kas, Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan *Financial Distress*”. Populasi penelitian ini adalah semua jenis sektor industry kecuali sektor keuangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia 2011 sampai dengan 2013 yang terlihat dalam Indonesia Capital Market Dictionary (ICMD) tahun 2010-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dengan kriteria yang ada diperoleh sampel sebanyak 348 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Likuiditas dan arus kas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan umur perusahaan, solvabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* [9].

5. Penelitian Meilinda Triwahyuningtias (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Terjadinya Kondisi *Financial Distress*”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur yang telah terdaftar di BEI. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel pada penelitian ini berjumlah 34 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan instirusional dan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan komisaris independen, likuiditas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress* [4].



Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Claudia Laurenzia dan Sufiyati (2015)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Likuiditas, Aktivitas, Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2014	Variabel Dependen : <i>Financial Distress</i>  Variabel Independen: 1. Kepemilikan institusional 2. Ukuran dewan komisaris 3. Likuiditas 4. Aktivitas 5. <i>Leverage</i>	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> 2. Ukuran dewan komisaris, likuiditas, aktivitas, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
Indra Hastuti (2014)	Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kesulitan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008–2012)	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>  Variabel Independen: 1. Kepemilikan manajerial 2. Kepemilikan institusional 3. Likuiditas 4. <i>Leverage</i> 5. Aktivitas 6. Ukuran perusahaan	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> . 2. Rasio likuiditas dan rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> 3. Kepemilikan institusional, rasio <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
Yeni Yustika (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Operating Capacity</i> Dan Biaya Agensi Manajerial	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>  Variabel Independen: 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i>	1. Likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> . 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>

Sambungan Tabel 2.1

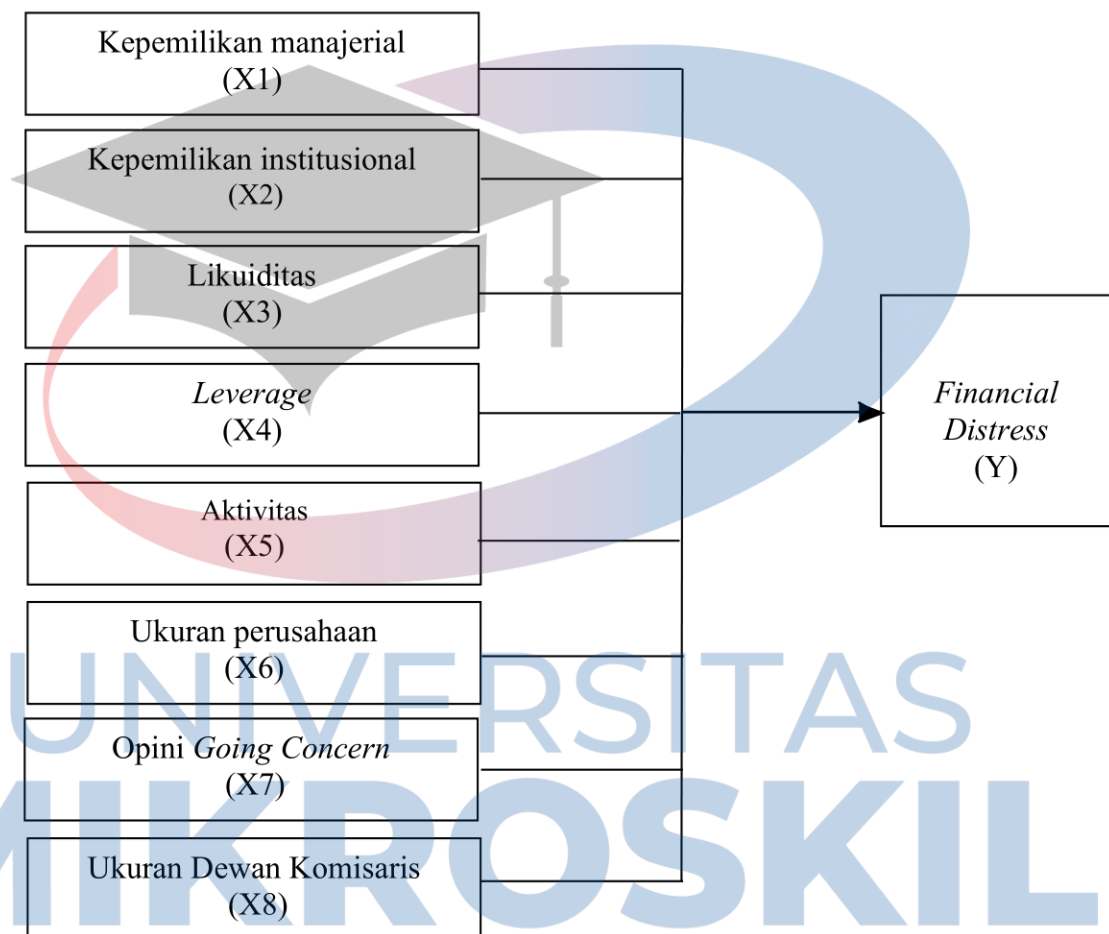
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
	Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)	3. Profitabilitas 4. <i>Operating Capacity</i> 5. Biaya Agensi Manajerial	3. <i>Operating capacity</i> dan biaya agensi manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
Puji Astuti (2014)	Analisis Pengaruh Opini <i>Going Concern</i> , Likuiditas, Solvabilitas, Arus Kas, Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan <i>Financial Distress</i>	Variabel Dependen : <i>Financial Distress</i>  Variabel Independen: 1. Opini <i>Going Concern</i> 2. Likuiditas 3. Solvabilitas 4. Arus Kas 5. Umur Perusahaan 6. Ukuran Perusahaan	1. Opini <i>going concern</i> positif berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 2. Likuiditas dan arus kas berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . 3. Umur perusahaan, solvabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
Meilinda Triwahyuningtas (2012)	Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Terjadinya Kondisi <i>Financial Distress</i>	Variabel Dependen : <i>Financial Distress</i>  Variabel Independen: 1. Struktur Kepemilikan 2. Ukuran Dewan 3. Komisaris Independen 4. Likuiditas 5. <i>Leverage</i>	1. Kepemilikan manajerial, kepemilikan instirusional dan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi <i>financial distress</i> 2. Ukuran dewan komisaris dan komisaris independen, likuiditas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi <i>financial distress</i> .

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Independen :

Variabel Dependen:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Dari gambar kerangka pemikiran di atas dapat dilihat bahwa Variabel dependen yang digunakan adalah *Financial Distress*. Sedangkan variabel Independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas, *leverage*, aktivitas, ukuran perusahaan, opini *going concern* dan ukuran dewan komisaris.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis penelitian ini adalah :

### 2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Financial Distress*

Kepemilikan manajerial mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajemen (direksi atau komisaris) maka semakin besar pula tanggung jawab manajemen tersebut dalam mengelola perusahaan. Semakin besarnya kepemilikan manajerial mampu menyebabkan turunnya potensi *financial distress*. Pengawasan pada pihak manajemen perusahaan yaitu pada kebijakan yang akan diambil, akan semakin ketat apabila terdapat kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* [1]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1a</sub> : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh terhadap *Financial Distress***

### 2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Instiusional terhadap *Financial Distress*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan oleh sebuah institusi/perusahaan lain yang berada didalam maupun di luar negeri. Kepemilikan institusional diharapkan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga biaya agensi dapat diminimalkan. Dengan demikian, semakin meningkatnya monitoring dari kepemilikan institusional akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk bekerja lebih baik untuk menghindarkan perusahaan dari *financial distress*.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* [3]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1b</sub> : Kepemilikan Instiusional Berpengaruh terhadap *Financial Distress***



### 2.4.3. Pengaruh Likuiditas terhadap *Financial Distress*

Likuiditas merupakan kemampuan suatu entitas untuk melunasi kewajiban lancar perusahaan dengan memanfaatkan aktiva lancarnya [4]. Untuk mampu mempertahankan agar perusahaan tetap dalam kondisi likuid, maka perusahaan harus memiliki dana lancar yang lebih besar dari utang lancarnya. Ketika perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat dapat diartikan perusahaan tersebut sedang dalam posisi tidak likuid [5]. Semakin likuid suatu perusahaan maka perusahaan tersebut semakin terhindar dari ancaman mengalami *financial distress*.

Penelitian mengenai pengaruh likuiditas yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* [1]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1c</sub> : Likuiditas Berpengaruh terhadap *Financial Distress***

### 2.4.4. Pengaruh *Leverage* terhadap *Financial Distress*

*Leverage* menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Semakin besar jumlah utang maka semakin besar potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya peristiwa gagal bayar, hal ini disebabkan oleh semakin besar jumlah hutang, semakin tinggi probabilitas *financial distress*. Perusahaan dengan banyak kreditor akan semakin cepat bergerak ke arah *financial distress*, dibanding perusahaan dengan kreditor tunggal.

Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak menggunakan utang, hal ini beresiko akan terjadi kesulitan pembayaran di masa yang akan datang akibat utang lebih besar dari aset yang dimiliki. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik, potensi terjadinya *financial distress* pun semakin besar. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *financial distress* [6]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1d</sub> : *Leverage* Berpengaruh terhadap *Financial Distress***

#### 2.4.5. Pengaruh Aktivitas terhadap *Financial Distress*

Aktivitas dapat digunakan dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya [7]. Aktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset (sumber daya) yang dimilikinya secara efektif. Aktivitas yang semakin tinggi menunjukkan perputaran yang lebih baik, dan mengindikasikan aset yang lebih sehat untuk memenuhi kewajiban lancarnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*. Sebaliknya, aktivitas yang semakin rendah menunjukkan perusahaan menyimpan terlalu banyak persediaan, sehingga tidak produktif dan tingkat pengembaliannya pun menjadi rendah. Hal itu akan memperkecil keuntungan perusahaan dan membuat tidak likuid sehingga kemungkinan terjadi *financial distress* semakin besar [8].

Penelitian mengenai pengaruh aktivitas yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas berpengaruh terhadap *financial distress* [1]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1e</sub> : Aktivitas Berpengaruh terhadap *Financial Distress***

#### 2.4.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Financial Distress*

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan mudah melakukan *diversifikasi* dan cenderung lebih kecil mengalami kebangkrutan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan perusahaan semakin mampu dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *financial distress* [5]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1f</sub>: Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap *Financial Distress***

#### 2.4.7. Pengaruh Opini Going Concern terhadap *Financial Distress*

Opini *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Para pemakai laporan keuangan merasa bahwa pengeluaran opini *going concern* ini sebagai prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka semakin kecil kemungkinan bagi auditor untuk memberikan opini *going concern*.

Seorang auditor akan sangat memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam menerbitkan opini *going concern*. Perusahaan yang tidak mempunyai permasalahan yang serius kemungkinan besar tidak akan menerima opini *going concern*. Penelitian mengenai pengaruh opini *going concern* yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa opini *going concern* berpengaruh terhadap *financial distress* [9]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1g</sub> : Opini Going Concern Berpengaruh terhadap *Financial Distress***

#### 2.4.8. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Financial Distress*

Ukuran Dewan komisaris perusahaan bertugas sebagai pengawas pengelolaan perusahaan yang dipimpin oleh direktur utama. Direktur memiliki kewenangan untuk mengatur operasional perusahaan secara penuh, dibawah pengawasan dewan komisaris. Akan tetapi, tentunya direktur harus berani bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul dari keputusan yang telah dibuat. Setiap tahunnya dewan direktur yang dipimpin oleh direktur utama membuat laporan tahunan yang berisi laporan keuangan perusahaan dan kegiatan apa saja serta keputusan yang telah diambil dalam satu tahun tersebut kepada pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Jumlah dewan komisaris yang semakin besar dapat membantu perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik, sehingga potensi salah urus (*mismanagement*) yang berakibat pada *financial distress* dapat diminimalkan.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh

terhadap *financial distress* [11]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1h</sub> : Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap *Financial Distress***

